

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat tentunya mempunyai karakteristik dan latar belakang kepribadian yang berbeda-beda, karena mereka merupakan sekumpulan dari banyak kepala yang kemudian berkumpul menjadi satu di suatu wilayah tertentu. Untuk menyeragamkan karakter masyarakat sangatlah sulit. Baik itu dalam sebuah pemikiran, perilaku, dan masih banyak lagi. Contohnya didalam sebuah Desa, secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa Sansekerta, yang berarti tanah, air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Dan berlandaskan keanekaragaman yang ada di wilayah tersebut (Widjaja, 2003: 3).

Desa diberi kekuasaan untuk mengatur wilayah itu sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah hanya mengawasi atau mengontrol apa yang dilakukan Desa melalui laporan-laporan yang sudah dibuat oleh pemerintah Desa. Misalnya saja dalam sebuah program pemerintah yang diberikan guna memberi bantuan untuk masyarakat. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara mandiri dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat baik individu maupun kelompok.

Pemerintah tentunya sudah merinci kriteria sasaran penerima bantuan. Salah satunya adalah Bantuan yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakatnya tentunya tidak terlepas dari banyaknya angka kemiskinan di negara Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dengan melihat data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan) di negara Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12%), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan kondisi Maret 2017 yakni sebesar 27,77 juta orang atau apabila di presentase menjadi 10,64% (www.bps.go.id diakses pada tanggal 05 Oktober 2018 pukul 05:45 WIB). Angka tersebut tentunya jumlah yang tidak sedikit untuk negara Indonesia. Alasan itulah yang memungkinkan

pemerintah mempunyai kebijakan tersebut, supaya semua masyarakat yang mereka pimpin merasakan makmur dan sejahtera.

Data masyarakat miskin tentunya biasa di dapatkan melalui survei dan mereka yang memenuhi kriteria sebagai masyarakat miskin. Adapun kriteria masyarakat miskin menurut Badan Pusat Statistik antara lain:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu minggu sekali.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ Poli Klinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,-/bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Suatu keluarga dapat dikatakan miskin apabila minimal memenuhi 9 poin kriteria orang miskin menurut BPS. Apabila suatu keluarga tidak memenuhi kriteria tersebut atau kurang dari sembilan poin, maka belum bisa dikatakan sebagai golongan masyarakat miskin (www.bps.go.id diakses pada tanggal 05 Oktober

2018 pukul 05:45 WIB).

Bukan hanya Badan Pusat Statistik saja yang mempunyai kriteria orang miskin lembaga lain juga mempunyai kriteria supaya orang tersebut bisa dikategorikan sebagai orang miskin, *World Bank* atau Bank Dunia misalnya. Lembaga tersebut juga mempunyai kriteria pengkategorian antara masyarakat mampu (menengah keatas) dan masyarakat miskin atau mempunyai pendapatan dibawah rata-rata. Adapun kriteria miskin menurut *World Bank* adalah orang yang setiap harinya mempunyai pendapatan di bawah 2 USD atau lebih tepatnya 1,9 USD yang jika di nilaikan mata uang rupiah sebesar Rp. 27.626,- (hal tersebut tergantung dengan kurs yang sedang terjadi pada saat tertentu) (www.jawapos.com 05 Oktober 2018 pukul 07:23 WIB).

World Bank menjelaskan kemiskinan menjadi tiga antara lain: Kemiskinan ekstrim merupakan kemiskinann yang dialami oleh mereka yang memiliki total pendapatan kurang dari 1 US Dollar perharinya. Yang kedua yaitu kemiskinan moderat yaitu dialami oleh mereka yang mempunyai hasil atau pendapatan 2 US Dollar perharinya, kemiskinan jenis moderat masih bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan untuk sehari-harinya, namun mereka tidak mampu untuk berinvestasi untuk masa depan keluarga mereka seperti menabung, pendidikan, membeli rumah, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kemiskinan relatif, kemiskinan jenis ini merupakan mereka yang masih mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa sedikit berinvestasi, misalnya mereka yang masih mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya atau dengan kata lain mereka masih bisa memperhatikan pendidikan yang bisa dimanfaatkan untuk merubah kehidupannya beserta orang-orang yang ada disekelilingnya.

Kriteria-kriteria yang diberikan oleh *World Bank* dan Badan Pusat Statistik bisa dijadikan patokan oleh pemerintah untuk menentukan siapa saja calon penerima bantuan. Namun hal yang berbeda terjadi di Kabupaten Gresik, demikian karena mereka tidak berpatokan penuh pada kriteria-kriteria yang ditentukan oleh *World Bank* dan BPS. Hal tersebut karena setiap tempat mempunyai standart kehidupan yang berbeda-beda. Di Gresik sendiri orang miskin bukan berarti mereka tidak punya apa-apa yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hanya saja berbeda standarnya. Hal tersebut mengingat upah minimal masyarakat gresik

sendiri sudah diatas rata-rata dari yang sudah menjadi standart orang miskin dari BPS dan *World Bank*.

Upah minimal Kabupaten Gresik memang cukup besar, namun bukan berarti orang-orang Gresik mampu menyeimbangkan kebutuhan dari upah pekerjaan mereka karena biaya hidup di Gresik juga lumayan mahal. Artinya meskipun mempunyai patokan yang sama yakni BPS dan Bank Dunia tetapi biaya hidup di masing-masing daerah merupakan permasalahan yang tidak bisa dipukul rata. Petugas PKH di Kabupaten Gresik mengatakan bahwa sering kali di Kabupaten Gresik sendiri menggunakan patokan kearifan lokal untuk mengukur kemampuan dari masyarakatnya (Widhodo 01/2019).

Bantuan sosial tentunya langkah presiden yang banyak ditunggu banyak masyarakat terutama masyarakat miskin. Selain untuk mengangkat perekonomian masyarakat miskin, bantuan dari pemerintah juga bisa menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat. Yakni menjadikan sebuah kebiasaan yang berdampak tidak baik bagi pola pikir seseorang dan berimbas pada perilaku yang dilakukan sehari-hari. Seperti malas dan ketergantungan diri kepada bantuan pemerintah. Bahkan budaya kemiskinan seringkali dianggap sebagai faktor penyebab munculnya masalah sosial yang lainnya (Lewis, 1993: 6).

Masalah sosial yang dimaksud disini merupakan sebuah masalah yang timbul karena seseorang tertentu selalu merasa tidak puas dan ingin memenuhi kebutuhan yang dirasa kurang tersebut. Tidak heran berbagai perilaku ditempu untuk memenuhi kebutuhannya hingga rela melakukan hal yang diluar nalar seperti mencuri, merampok, bahkan tidak segan untuk melakukan tindak kekerasan kepada sasaran yang akan ditujunya. Selain itu, adapula pendapat dari buku yang berbeda yakni adanya kemiskinan disebabkan oleh adanya masalah sosial yang ada di sebuah masyarakat (Geertz, 1983: 150).

Tidak lepas dari topik kemiskinan orang-orang yang mempunyai ide-ide lain dan mampu memanfaatkan keadaan, mereka mampu menjadikan kemiskinan sebagai sebuah komoditas yakni menghasilkan uang bagi mereka (Totona, 2010: 73). Contohnya banyak media sosial dan masyarakat menyoroti sebuah kemiskinan dengan rasa empati yang tinggi. Dengan rasa itu tentunya menarik perhatian kita supaya berlomba-lomba mengulurkan bantuan untuk mereka yang di anggap

saudara. Terutama pihak pemerintah yaang selalu dituntut untuk bisa mengayomi dan memerdekakan masyarakatnya. Pemerintah mempunyai sebuah program tentunya dengan harapan bisa mengentaskan masyarakat miskin dari ketertinggalan dan kesensaraan. Akan tetapi bantuan yang diberikan pemerintah merupakan salah satu faktor pendukung bagaimana sifat ketergantungan masyarakat. Terlepas dari itu, pemerintah tentunya sudah menetapkan kriteria-kriteria yang cocok untuk mendapatkan bantuan.

Beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Beras orang Miskin (RasKin), Bedah Rumah, dan lain sebagainya. Untuk raskin dan bedah rumah dicirikan masyarakat dengan kriteria sebagai berikut: tidak mempunyai tanah/rumah, dinding rumah tidak terbuat dari tembok, masing-masing orang menempati 8 m² luas petak rumah, tidak mempunyai lahan/sawah, penghasilan 0-1 juta setiap bulannya. Berbeda lagi apabila penerima bantuan *PKH*, selain yang sudah disebutkan diatas penerima bantuan ini juga harus memenuhi syarat khusus, yakni mempunyai anak usia wajib sekolah 12 tahun (SD-SMA), warga masyarakat yang sudah lanjut usia (lansia), ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Penerima bantuan ini tentunya harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh panitia pemberi bantuan. Kriteria tersebut tentunya diperoleh dari data-data yang diberikan oleh pemerintah desa kepada pemerintah pusat yakni basis data terpadu atau sering kali disebut BDT. Data tersebut tentunya mudah didapatkan, terlebih lagi bagi desa yang rajin melakukan pembaruan pada datanya. Sejak terbentuknya Undang-Undang Desa Racikulon, pemerintahan juga menertibkan pemetaan yang ada di Desa tersebut, mulai dari pendidikan, jenis kelamin, usia, ekonomi, pertambahan & pengurangan penduduk dan lain sebagainya. Pemetaan tersebut sangat membantu pemerintahan pusat untuk memantau perkembangan Desa dan apa saja yang diperlukan oleh Desa.

Pada saat ada bantuan pemerintahan pusat mengenai bantuan yang berobjekkan orang miskin seperti PKH, pemerintah pusat cukup melihat data statistik yang di laporkan oleh pemerintah Desa kepada pemerintah pusat. PKH merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Data tersebut kemudian dibarengi dengan kriteria-kriteria yang bisa menguatkan

mereka untuk menjadi objek PKH. Dalam proses keluarnya bantuan, tentunya terdapat beberapa pihak yang membantu calon penerima maupun penerima bantuan untuk mengurus bantuan yang diberi oleh pemerintah pusat.

Tidak lepas dari hal itu, beberapa pertukaran seringkali dijumpai pada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang tertentu yang sudah terseleksi. Pertukaran tersebut secara tidak langsung mengikat beberapa oknum untuk saling bekerja sama sehingga kemudian terjalin sebuah interaksi yang melibatkan keduanya. Pertukaran yang dimaksud merupakan sebuah timbal balik dari hasil interaksi dan menghasilkan sebuah hubungan yang mana mereka saling berharap bias menguntungkan satu sama lain.

Pertukaran bisa berupa sebuah relasi yang berhasil dibangun akibat dari interaksi beberapa oknum. Bukan hanya itu, pertukaran juga bisa berupa pertukaran secara ekonomi, jasa dan masih banyak lagi. Didalam PKH sendiri bisa terjadi berbagai pertukaran atau relasi antara petugas dan anggota, anggota dan anggota lainnya, maupun petugas dengan petugas lainnya.

Pertukaran sosial yang terjadi di Desa Racikulon sudah menjadi budaya atau persoalan yang biasa (bagi beberapa orang) bahkan bisa dikatakan tidak etis apabila mereka tidak saling bertukar sesuatu. Pertukaran tersebut dianggap ucapan terimakasih atau bentuk timbal balik atas perilaku yang sudah dilakukan seseorang kepada orang lainnya. Padahal seharusnya bantuan yang bersumber dari pemerintah tidak dipungut biaya administrasi, biaya transportasi, dan masih banyak lagi istilah lain yang sering digunakan.

Kebiasaan tersebut seringkali terjadi karena perasaan tidak enak yang ada didalam diri mereka setelah mendapatkan sebuah bantuan dari orang lain, baik itu jasa maupun yang lainnya. Terlebih lagi masyarakat Desa Racikulon yang tidak paham dengan hukum dan pasal-pasal yang berlaku maka semakin banyak dijumpai pula orang-orang yang melakukan timbal balik atau yang disebut dengan pertukaran sosial itu sendiri.

Penelitian kali ini berfokus kepada sebuah perilaku yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan PKH. Terjadinya pertukaran atau yang disebut dengan timbal balik didalamnya menjadikan daya tarik tersendiri bagi peneliti. Bukan hanya itu, beberapa hal lain yang menarik perhatian peneliti juga bisa

ditemukan didalamnya. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa peneliti tertarik untuk mengambil judul "Studi Fenomenologis Terhadap Pertukaran Sosial dalam Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Racikulon". Peneliti tertarik mengangkat judul tersebut karena di Desa Raci Kulon dalam bantuan PKH ditemui pertukaran sosial antara oknum-oknum tertentu dengan masyarakat penerima bantuan *PKH*. Pertukaran tersebut menjadikan seseorang untuk melakukan perilaku yang telah dilakukannya secara berulang kali, karena perilaku tersebut senantiasa mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dibuat diatas maka dibuat rumusan masalah: Bagaimana pertukaran sosial terjadi pada bantuan PKH di Desa Racikulon Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana pertukaran sosial bisa terjadi pada bantuan PKH di Desa Racikulon Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan dapat mengembangkan bidang dalam ilmu Sosiologi. Terlebih dalam penelitian yang dilakukan mengenai pertukaran sosial (*proposisi sukses*) di masyarakat Desa Racikulon Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ketika ada bantuan dari pihak pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan referensi dan pengetahuan kepada pembaca tentang pertukaran sosial (*proposisi sukses*) yang dimiliki masyarakat di Desa Racikulon Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ketika ada bantuan dari pihak pemerintah.